

Pembangunan ibu kota nusantara (IKN): antara peluang strategis dan tantangan transformasi nasional

Maiya Hasanatud Daroini

Program studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: idaroinidayis11@gmail.com

Kata Kunci:

IKN, kebijakan publik, pemindahan, pembangunan, transformasi.

Keywords:

IKN, Public Policy, relocation, Development, Transformation

Abstrak

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi salah satu kebijakan strategis nasional dengan dampak multidimensional, mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kebijakan ini tidak hanya merefleksikan keinginan untuk meredakan beban Jakarta, tetapi juga sebagai wujud pemerataan pembangunan dan transformasi Indonesia menuju negara maju dan berkelanjutan. Melalui pendekatan normatif dan studi literatur, artikel ini menyoroti prinsip hukum, adidum pemerintahan, teori pembangunan wilayah, serta tinjauan kebijakan dari negara-negara lain yang pernah mengalami hal serupa. Hasil kajian

menunjukkan bahwa pembangunan IKN memiliki potensi strategis untuk menjadi katalisator pembangunan nasional, namun tetap harus diimbangi dengan perencanaan holistik dan partisipasi publik yang inklusif.

Abstract

The relocation of the national capital from Jakarta to Nusantara Capital City (IKN) in East Kalimantan represents a strategic national policy with multidimensional impacts, encompassing political, economic, social, cultural, and environmental aspects. This policy not only reflects the intention to ease the burden on Jakarta but also serves as a manifestation of equitable development and Indonesia's transformation toward becoming an advanced and sustainable nation. Through a normative approach and literature review, this article highlights legal principles, governmental adages, regional development theories, and policy insights from other countries that have undertaken similar initiatives. The findings indicate that the development of IKN holds strategic potential to become a catalyst for national development, yet it must be accompanied by holistic planning and inclusive public participation.

Pendahuluan

Jakarta, sebagai ibu kota Republik Indonesia selama lebih dari tujuh dekade, telah memainkan peran vital dalam dinamika politik, ekonomi, dan sosial nasional. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa Jakarta mengalami tekanan luar biasa sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis, menyebabkan berbagai persoalan struktural seperti kemacetan, polusi udara, penurunan muka tanah, hingga ketimpangan pembangunan antara kawasan barat dan timur Indonesia. Menyikapi kondisi ini, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 resmi menetapkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dengan nama "Ibu Kota Nusantara" atau IKN.(Firnahirera & Lazuardi, 2022). Gagasan ini bukanlah hal baru. Bahkan sejak era Presiden Soekarno, wacana pemindahan ibu kota sudah pernah muncul, menunjukkan bahwa isu ini memiliki akar historis panjang. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Joko



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Widodo, gagasan tersebut mulai direalisasikan dalam skala besar sebagai bentuk reformasi struktural dalam tata kelola negara. Artikel ini membahas lebih lanjut latar belakang, argumentasi hukum, teori pembangunan, hingga studi komparatif dari negara lain untuk melihat bagaimana kebijakan ini dapat menjadi solusi terbaik bagi pembangunan nasional yang lebih merata, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Pembahasan

Landasan Hukum dan Filosofis Pemindahan Ibu Kota

Pemindahan ibu kota bukan hanya keputusan politis, tetapi memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dalam konsiderannya, undang-undang ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi baru, dan menjamin kesinambungan pemerintahan nasional yang lebih efisien dan merata secara geografis. Secara filosofis, langkah ini selaras dengan adagium "Salus populi suprema lex esto", keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pemindahan IKN dianggap sebagai upaya menyelamatkan rakyat dari tekanan sosial-ekonomi di Jakarta, serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang selama ini termarginalkan dari pusat kekuasaan.(Puspitaningrum, 2023)

Asas dan Teori Hukum yang Relevan

Dalam teori hukum pembangunan, menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum harus menjadi sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Pemindahan IKN adalah bentuk nyata dari upaya rekayasa tersebut, mengubah struktur sosial dan ekonomi dengan menciptakan pusat pertumbuhan baru yang diharapkan dapat memicu distribusi yang lebih adil terhadap sumber daya nasional. Dari perspektif asas hukum, langkah ini juga merepresentasikan asas keadilan dan kemanfaatan. Meskipun ada tantangan dalam pelaksanaannya, kebijakan ini bertujuan untuk memberi manfaat luas, tidak hanya bagi warga Kalimantan, tetapi juga seluruh Indonesia melalui integrasi ekonomi yang lebih baik dan pemerataan akses infrastruktur.(A et al., 2023)

Urgensi Pemerataan Pembangunan Nasional

Pemindahan IKN adalah bagian dari strategi dekolonialisasi pembangunan yang selama ini terpusat di Jawa. Dengan memindahkan pusat administrasi ke wilayah timur Indonesia, diharapkan akan terjadi redistribusi ekonomi, peningkatan investasi, dan penguatan sektor-sektor strategis seperti agrikultur, kehutanan, dan pariwisata. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan pembangunan berbasis wilayah (regional development), di mana pertumbuhan ekonomi tidak lagi terfokus pada satu kota besar, tetapi tersebar ke berbagai wilayah melalui infrastruktur dan konektivitas yang merata.(Pambudhi, 2024)

Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Proyek IKN memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Kalimantan Timur dapat meningkat signifikan dengan hadirnya infrastruktur baru, lapangan kerja, serta peluang usaha. Namun demikian, aspek sosial seperti potensi konflik agraria, pergeseran budaya lokal, dan integrasi masyarakat adat harus menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat lokal dan

pengakuan terhadap hak-hak adat harus dijamin sejak tahap awal perencanaan hingga implementasi.(Najilatil Mazda, 2022) Dalam aspek lingkungan, proyek IKN dihadapkan pada tantangan besar karena berlokasi di kawasan dengan ekosistem yang sensitif. Pemerintah mengusung konsep kota hutan (forest city) untuk menjawab tantangan ini. Menurut jurnal dari Wijayanti (2022), konsep smart and sustainable city dapat menjadi model pembangunan IKN yang berbasis teknologi dan ramah lingkungan.

Studi Komparatif dengan Negara Lain

Beberapa negara telah berhasil memindahkan ibu kotanya dengan tujuan yang serupa dengan Indonesia. Brasil, misalnya, mendirikan Brasilia untuk mendorong pengembangan wilayah tengah negara tersebut sekaligus mengurangi ketimpangan regional. Malaysia membangun Putrajaya sebagai pusat administrasi baru yang terpisah dari Kuala Lumpur, dengan harapan meningkatkan efisiensi birokrasi pemerintahan. Sementara itu, Kazakhstan memindahkan ibu kota dari Almaty ke wilayah tengah dan menamakannya Nur-Sultan, sebagai langkah strategis yang didorong oleh pertimbangan geopolitik dan pemerataan pembangunan. Ketiga contoh tersebut menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota dapat menjadi strategi pembangunan yang efektif apabila dilakukan melalui perencanaan jangka panjang, didukung oleh stabilitas politik, serta melibatkan partisipasi publik yang kuat. Tantangan-tantangan serupa juga menjadi perhatian dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara di Indonesia.(Habib et al., 2024)

Pandangan Tokoh dan Respon Publik

Tokoh seperti Bambang Brodjonegoro, yang pernah menjabat sebagai Menteri PPN/Bappenas, menegaskan bahwa pemindahan ibu kota bukan hanya simbol, tetapi strategi masa depan bangsa. Ia menyebut bahwa keputusan ini merupakan investasi jangka panjang yang akan membawa hasil dalam beberapa dekade ke depan. Meski begitu, respons publik masih beragam. Beberapa pihak khawatir soal urgensi proyek di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi, serta transparansi anggaran. Oleh karena itu, akuntabilitas dan komunikasi publik menjadi kunci keberhasilan jangka panjang.(Hadi & Gandryani, 2022).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan hanya merupakan agenda fisik pembangunan, tetapi juga simbol transformasi nasional menuju arah pemerataan dan keberlanjutan. Jakarta yang selama ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya telah menanggung beban berlebih dari segi infrastruktur, lingkungan, dan kepadatan penduduk. Oleh karena itu, pembangunan IKN hadir sebagai solusi untuk mendesentralisasi beban tersebut sekaligus menciptakan episentrum baru pembangunan yang lebih merata secara geografis. Secara hukum dan kebijakan, pemindahan ini memiliki landasan yang kuat baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip pemerintahan modern, seperti asas keadilan, keberlanjutan, dan efektivitas administrasi. Pendekatan normatif yang digunakan menunjukkan bahwa proyek ini dapat dipertanggungjawabkan secara legal,

dengan tetap memperhatikan aspek hak asasi masyarakat lokal serta perlindungan lingkungan. Selain itu, adigium seperti *salus populi suprema lex esto* (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) dapat menjadi dasar filosofis bahwa kebijakan ini bertujuan untuk kepentingan nasional jangka panjang.

Dari sisi pembangunan wilayah, teori-teori seperti growth pole theory dan regional development menjelaskan bahwa penciptaan pusat pertumbuhan baru dapat mendorong dinamika ekonomi regional dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Pengalaman negara lain seperti Brasil, Malaysia, dan Kazakhstan juga memperkuat argumen bahwa pemindahan ibu kota dapat menjadi strategi pembangunan yang efektif jika didukung oleh perencanaan jangka panjang, partisipasi publik, dan stabilitas politik. Namun demikian, tiap konteks negara tentu memiliki tantangan tersendiri, termasuk dalam hal pembiayaan, keberlanjutan lingkungan, serta penerimaan masyarakat. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan IKN merupakan kebijakan yang visioner dan potensial menjadi katalisator pembangunan nasional Indonesia. Meski menghadapi sejumlah tantangan, proyek ini tetap layak dilanjutkan dengan catatan harus dilaksanakan secara hati-hati, inklusif, dan bertanggung jawab. Pembangunan IKN tidak hanya mencerminkan arah baru tata kelola negara, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat identitas nasional dan mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan berkelanjutan.

Saran

Sebagai proyek strategis nasional, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan implementasi pembangunan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan berbasis data. Keterlibatan berbagai pihak—terutama masyarakat lokal, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat—akan memperkuat legitimasi sekaligus memperkecil potensi konflik sosial dan dampak lingkungan yang merugikan. Selanjutnya, dalam aspek regulasi dan kelembagaan, diperlukan harmonisasi kebijakan lintas sektor serta penguatan dasar hukum agar pembangunan IKN memiliki kepastian hukum yang kuat. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan serta mendukung kesiapan infrastruktur dan pelayanan publik secara bertahap. Evaluasi berkala terhadap progres pembangunan juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proyek ini tetap berjalan sesuai tujuan awal dan tidak menyimpang dari prinsip keadilan sosial serta keberlanjutan. Akhirnya, penting bagi Indonesia untuk terus belajar dari pengalaman negara lain yang telah berhasil memindahkan ibu kotanya. Studi komparatif, riset kebijakan, dan pertukaran pengetahuan internasional dapat dijadikan acuan untuk menghindari kesalahan serupa dan mengadopsi praktik terbaik. Dengan komitmen politik yang konsisten dan pengelolaan sumber daya yang bijak, IKN berpeluang menjadi simbol kemajuan bangsa dan pusat pertumbuhan baru yang inklusif, hijau, dan modern.

Daftar Pustaka

- A, A. O., Putri, A. I., Matthew, K., & Universitas, H. (2023). 23-Moderasi-0101-464 (1). 2023, 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Firnahirera, V. A., & Lazuardi, A. (2022). Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi

- Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 71–84. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.71-84>
- Habib, M. H. Al, Dairobbi, A., Zoya, R. A., & Pramasha, R. R. (2024). *IJEN : Indonesian Journal of Economy and Education Economy* DAMPAK PEMBANGUNAN IKN NUSANTARA: MENJADI SOLUSI PEMERATAAN PEREKONOMIAN ATAU TIMBUL PERMASALAHAN LINGKUNAN? *Habib dkk.*, 02(02), 405–411.
- Hadi, F., & Gandryani, F. (2022). KONSTITUSIONALITAS OTORITA IBU KOTA NUSANTARASEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN DAERAH(The Constitutionality of Nusantara Capital City Authority as a Local Government). *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), 1–19.
- Najilatil Mazda, C. (2022). Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (Ikn) Terhadap Social Security. *Jurnal Enersia Publika*, 6(1), 1–12. https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/view/1086
- Pambudhi, N. A. (2024). Analisis Pembangunan Ibukota Negara Baru dan Dampaknya Terhadap Anggaran Pertahanan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 70–79.
- Puspitaningrum, S. R. (2023). Pemindahan Ibu Kota Negara: Pembangunan Kota Inklusif dan Berkelanjutan. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 127–147. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i2.6096>